

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dewasa ini, Indonesia tengah menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik yang mendorong diperlukannya segera solusi dalam masalah ini. Permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat luas salah satunya ialah perbuatan korupsi yang masih menghantui negeri ini.¹ korupsi ini merupakan suatu penyakit akut bagi Indonesia dan sampai saat ini belum ada obat yang ampuh dan efektif untuk menyembuhkan penyakit ini. Korupsi seakan telah menjadi perilaku kolektif dikalangan para pejabat negeri. Perangkat perundang-undang antikorupsi memang telah ada, namun upaya dalam pembebrantasannya tidak lah mudah dan tentu dalam pelaksanaannya akan banyak sekali mengalami hambatan.

Korupsi saat ini berkembang sangat pesat dan telah menjadi suatu tindakan kriminal yang bersifat luar biasa. Sifat perbuatan korupsi sifat yang dapat merugikan banyak orang bahkan perbuatan korupsi dapat merusak perekonomian suatu bangsa.² Hal ini berdasarkan informasi dari media yang menyoroti berbagai kasus korupsi. Korupsi tidak hanya terjadi dalam ruang

¹ Chatrina Darul Rosikah and Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori Dan Peraktik*, ed. by Tarmizi, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.1.

² CTunku Abdul Aziz, 2005, *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, h. 61.

lingkup pembangunan, tetapi perbuatan hina ini bisa terjadi di seluruh sektor misalnya bidang pendidikan bahkan dalam bidang keagamaan³

Korupsi muncul sebagai budaya baru dan menjadi pilihan bagi para pemberhala hedonisme yang ingin memenuhi syahwat materialismenya.⁴ Selaras dengan pernyataan di atas Azyumardi Azra sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Busyro Muqaddas, memberikan pendapatnya bahwa korupsi di bumi pertiwi ini telah memasuki seluruh sendi kehidupan serta telah tertanam kuat dalam tingkah laku, dan pola berpikir masyarakat. Perbuatan korupsi telah mengakar di seluruh sendi kehidupan, mulai dari pemerintahan pusat sampai tingkat rumah tangga. Realita ini memperkecil harapan bangsa agar dapat memberantas budaya korupsi di negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia ini. Hal ini sangat jelas bertolak belakang jika dihubungkan dengan ajaran syari'at Islam yang di yakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia, yang menentang adanya tindakan suap menyuap.⁵

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, perbuatan korupsi dikategorikan tindakan kejahatan luar biasa yang telah menjadi budaya dilingkungan masyarakat bahkan sudah mengubah pola perilaku, cara berpikir dari sebagian masyarakat Indonesia. Berbagai macam modus dari kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang melibatkan banyak dari pejabat publik yang senantiasa

³ *Ibid.*

⁴ M. Busyro Muqoddas, korupsi, dalam M uhammad Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. v.

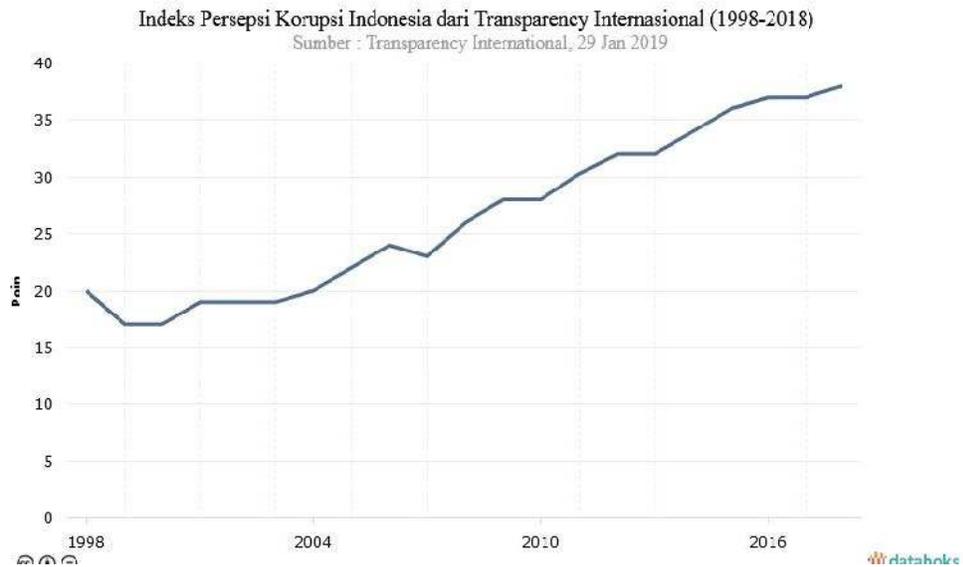
⁵ *Ibid.*, h. ix.

memanfaatkan wewenangnya untuk melakukan tindakan yang merugikan negara dari berbagai macam kasus korupsi di Indonesia, diantara banyaknya kasus korupsi penulis mengambil beberapa sampel tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia diantaranya ialah kasus suap Anang Basuki, mantan ajudan Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur yang terlibat kasus suap menyuap hanya dituntut 1,5 tahun penjara oleh KPK, lalu kasus yang melibatkan Irvanto Hendra Pambudi, Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera dituntut 12 tahun penjara dalam kasus pengadaan KTP-El, kemudian Kasus BLBI yang menimpa Syafruddin Arsyad Temenggung, Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, dan Dorodjatun yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.5 Triliun, serta kasus yang teranyar ialah jual beli jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan politikus Partai Pembangunan Persatuan, Romahurmuziy dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.⁶

Berdasarkan dari berbagai kasus korupsi yang telah disebutkan oleh penulis di atas tidak heran bahwa jika beberapa hasil survei yang dilakukan oleh lembaga transparansi mengindikasikan masih tingginya tingkat korupsi di bumi pertiwi, salah satunya dari hasil data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang di terbitkan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) 2018 yang di rilis pada tanggal 29 Januari 2019, yang digambarkan melalui grafik dari pertumbuhan kasus korupsi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu di mulai dari tahun 1998 sampai 2018,

⁶ Alvin nicola Wawan Suyatmiko, *Inisiatif Penguatan Lembaga Antikorupsi Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Transparency International, 2019).

Gambar 1
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari Transparaency Internasional
(1998-2018)



Sumber : *Transparency International* 29 Januari 2019

Dari data di atas kita bisa melihat bahwa lembaga Transparency International merilis mengenai riset Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2018 untuk Negara Indonesia . pada 2018 naik satu poin ke 38 dari skala 0-100. Dengan nilai tersebut negara kita berada di peringkat 89 dari 180 negara . Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi ini bisa di bilang sudah maksimal meskipun dari segi posisi sudah meningkat. Kondisi ini perlu

menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi lain dalam memburu dan pemberantasan tikus pengeruk uang rakyat.⁷

Jika memperhatikan dari data diatas, maka kasus korupsi di Indonesia masih menjadi problematika yang merugikan bangsa ini. Setelah berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mendapatkan hasil cukup baik, namun belum membuat para koruptor atau para calon koruptor di negri ini jera , kini pemerintah mulai memberikan alternatif lain dalam menanggulangi tindakan korupsi di Indonesia dengan melirik sektor pendidikan sebagai upaya lain dalam mencegah tindakan korupsi di masa yang akan datang, sebagaimana yang diketahui bahwa pendidikan memiliki tanggungjawan akan pentingnya penguatan kesadaran diri peserta didik untuk melawan perilaku korupsi melalui lembaga pendidikan baik secara formal, non formal maupun in formal.⁸

Pada dasarnya ternyata banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi salah satu diantaranya ialah karena adanya sifat egoisme yang ternanam dalam jiwa seseorang sifat ini akan berkembang pesat jika didukung dengan timbulnya kesempatan serta adanya niat. Artinya, jika seseorang memiliki niat untuk mengerjakan perbuatan korupsi tetapi tidak memiliki kesempatan, maka hal itu sulit untuk terjadi. Namun sebaliknya juga, perbuatan tersebut tidak bisa dilakukan walau ada kesempatan tetapi tidak memiliki niat untuk mengerjakannya, maka tindakan korupsi juga tak akan

⁷ Wana Alamsyah, Lais Abid, and Agus Sunaryanto, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*,(Jakarta: Indonesia Corruption Wacth, 2018), h. 1.

⁸ Rasyidi, Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam, *Jurnal Tamaddun Ummah*, Vol. 1 No. 1 (Oktober, 2015), h. 1.

terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi terlahir jika adanya kombinasi dari moral dan prosedur yang berlaku, keegoisan sifat manusia membuat ia merubah sistem untuk melakukan perbuatan haram ini.⁹

Upaya pemberantasan korupsi memang memberikan efek jera tetapi hasilnya bersifat sementara, karena praktik dalam perbuatan korupsi telah terajut sangat luas, maka diperlukan usaha lain yang hasilnya yakni melalui sektor pendidikan. Dasar adanya penanaman nilai antikorupsi dalam dunia pendidikan tertuang di dalam UU No. 30 Tahun. 2002 pasal 13 huruf d yang berbunyi “menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan” merupakan pilar penting dalam upaya pencegahan tindakan pidana korupsi.¹⁰

Poin penting dalam pendidikan antikorupsi ini ialah pembentukan moral peserta didik agar bisa tertanam dalam jiwanya mengenai nilai-nilai dari anti korupsi itu sendiri, ketika berbicara mengenai pembentukan moral, keseriusan pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi melalui perbaikan sektor moral masyarakatnya telah dibuktikan melalui keputusan presiden kelima yaitu, Susilo Bambang Yudhoyono, yang telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.¹¹ Selain itu, adanya kerjasama secara masif yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanamkan nilai-nilai

⁹ Ade Imelda Frimayanti, *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam. volume 8, no 1, 2017*, h. 8.

¹⁰ Eko Handoyo, *Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 8.

¹¹ Siti Nurkhasanah, *Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul*, (2013), h. 3.

antikorupsi dalam kurikulum sekolah mulai tahun ajaran 2012/2013 hal ini dilakukan karena kian menjamurnya praktik korupsi di Indonesia.¹²

Upaya pencegahan ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pembinaan pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan merupakan salah satu wahana untuk mendukung fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan antikorupsi merupakan sarana yang strategis untuk membina dan membimbing generasi muda agar terbentuk jiwa yang anti terhadap korupsi dalam dirinya.

Menurut Kemendikbud, terdapat sembilan nilai antikorupsi yang dapat di internalisasikan dalam dunia pendidikan, diantaranya ialah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan. Penanaman ke sembilan nilai ini di dalam satuan pendidikan atau lebih mengerucut lagi dalam sebuah mata pelajaran sangatlah penting karena menjadi salah satu cara alternatif yang bersifat preventif dalam upaya pencegahan tindakan korupsi sedari dini, karena pendidikan memiliki sifat membangun generasi baru yang lebih baik di

¹² *Ibid.*, h. 5.

masa yang akan datang. Sebagai alternative yang bersifat preventif, melalui jalur pendidikan ini diharapkan mampu membangun kualitas generasi muda di berbagai aspek kehidupan, serta dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa.¹³

Penanaman nilai antikorupsi bertujuan mencegah adanya kecenderungan korupsi dari faktor internal peserta didik. Upaya ini bersifat urgen untuk menumbuhkan nilai tersebut terhadap peserta didik sehingga ketika generasi muda ini menjadi pemimpin bangsa minimal mereka dapat melindungi diri dari perbuatan korupsi ini dan harapannya mereka bisa menjadi salah satu aktor nasionalis yang berperan dalam pemberantasan korupsi di negri ini sebagai salah satu bentuk implementasi dari nilai tersebut.

Selaras dengan data yang telah dideskripsikan di atas , salah satu bentuk kongkrit dalam melakukan pencegahan korupsi melalui sektor pendidikan ialah dengan ditetapkannya Kompetensi Inti satu dan dua untuk satuan pendidikan di tingkat SMA, sebagai berikut :

- (K1) : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- (K2) : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro- aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.¹⁴

¹³ Pedoman Sekolah, *Pengembangan Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional dan Badan Penelitian Pengembangan Pusat Kurikulum, 2011), h. 1.

¹⁴ Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia no 36 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas/madrasah aliyah, h. 6.

Dari data kompetensi inti satu dan dua tersebut, menerangkan bahwa dalam proses belajar mengajar, fokus peserta didik tidak hanya pada aspek pengetahuan saja namun pendidikan agama Islam harus dikembangkan menuju internalisasi dalam sebuah sikap yang tentunya diimbangi dengan aspek pengetahuan yang baik, sehingga peserta didik akan termotivasi untuk mempraktikkan nilai dasar agama dalam kehidupan nyata..

Jika diperhatikan dalam sudut pandang agama Islam secara komprehensif, tindakan korupsi ini sangat bertolak belakang dengan tujuan dari agama Islam itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*rahmatan lila'lamin*) dan membahagiakan individu serta masyarakat. Padahal di dalam ajaran *syari'at* agama Islam, para pemeluknya diajarkan berbagai tuntunan tentang berakhlak mulia. Akhlak yang mulia akan membuat seorang manusia terhindar dari segala perbuatan yang tercela. Penanaman nilai akhlak mulia itu pun harus dilakukan sedini mungkin. Siswa juga harus dituntun untuk membiasakan diri dalam menerapkan akhlak mulia di setiap perbuatannya, semua mata pelajaran yang diajarkan di dalam satuan pendidikan memiliki tanggungjawab untuk membentuk akhlak yang baik bagi peserta didiknya, namun mata pelajaran yang memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam menumbuhkembangkan akhlak peserta didiknya ialah pelajaran pendidikan Agama Islam.¹⁵ Penanaman nilai antikorupsi yang ditunjukkan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ialah pembelajaran secara konseptual disisipkan pada mata pelajaran yang ada di

¹⁵ Abdullah Hadziq, *Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran PAI Di Sekolah* (Studi Kasus Di Sekolah Menengah Atas Negeri 03 Semarang), (Skripsi -- Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009), h. 3-4.

sekolah dalam bentuk perluasan tema pembahasan yang terdapat di dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu dengan model pembelajaran antikorupsi integratif-inklusif dalam Pendidikan Agama Islam.

Islam sebagai agama yang paripurna telah memberikan pondasi tentang tujuan dan hakikat pendidikan, yaitu memberdayakan potensi fitrah manusia untuk mengarah kepada nilai kebenaran serta kebajikan. Oleh sebab itu, definisi pendidikan Islam adalah “segala usaha untuk mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insan kamil*) sesuai dengan norma Islam”. Marimba, menjelaskan, pendidikan Islam ialah “membimbing jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju kepribadian utama.” Sedangkan Zuhairini menyatakan pendapat bahwa pendidikan Islam adalah “usaha sistematis, pragmatis dalam membentuk anak didik agar hidup sesuai dengan ajaran Islam”. Jika melihat pengertiannya, maka tujuan pendidikan Islam ialah untuk menjadikan peserta didiknya menjadi manusia beriman, bertakwa serta berakhlak mulia. Dalam sudut pandang lain Al-Abrasyi memberikan opininya bahwa tujuan pendidikan Islam yang utama adalah “mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa.” Karena itu menurut beliau seluruh pelajaran harus mengandung pelajaran akhlak serta setiap pendidik harus memperhatikan akhlak peribadinya.

Pendidikan ialah suatu usaha membina seluruh kemampuan manusia sebagai makhluk yang berfikir, beriman, produktif untuk diri sendiri maupun oranglain. Oleh karena itu pelajaran pendidikan agama Islam mempunyai peranan penting serta tanggungjawab lebih dalam membentuk dan

mengembangkan potensi akhlak dari peserta didik sesuai dengan *syari'at* agama Islam, salah satunya adalah membentuk dan mengembangkan nilai – nilai anti korupsi agar terbentuknya akhlak untuk menolak segala bentuk dan perbuatan korupsi. Penanaman nilai antikorupsi cukup efektif dilakukan secara komperhensif pada tingkat SMA/SMK/MA, karena pada tahap ini peserta didik sedang berada pada perkembangan pertengahan dunia remaja, menurut Piaget sebagaimana yang dikutip oleh Eko Handoko, berpendapat bahwa pemikirannya peserta didik tingkat SMA pada tahap formal *operations*, dimana peserta didik memiliki daya berfikir abstrak, sehingga mereka mampu memvisualisasikan suatu kemungkinan dalam penyelesaian masalah. Fokus dari penanaman antikorupsi pada fase ini ialah agar peserta didik dapat menghayati, memahami nilai antikorupsi itu sendiri, dan membentuk sikap dalam kebiasaan yang mencerminkan nilai tersebut.¹⁶

Oleh karena itu penulis sangatlah tertarik untuk meneliti, mengenai nilai-nilai antikorupsi yang terkandung di dalam buku teks Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga penelitian ini bisa dijadikan solusi alternatif untuk membendung arus korupsi di negara kita melalui sektor pendidikan. Berdasarkan data yang disajikan, hal ini menjadi pendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: “ *Nilai-Nilai Antikorupsi Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA*”

¹⁶ Eko Handoko, *Pendidikan Antikorupsi*, h. 12

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Karena keterbatasan waktu , *budget*, kemampuan penulis serta agar penelitian ini lebih terarah, maka problematikanya terfokus pada, Nilai-Nilai Antikorupsi Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA. Dari fokus penelitian ini, kemudian dibagi menjadi tiga subfokus, diantaranya ialah:

1. Sembilan nilai antikorupsi di dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA.
2. Bentuk pengungkapan nilai anti korupsi di dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA.
3. Intensitas nilai antikorupsi di dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA.

C. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah ialah suatu pertanyaan yang memerlukan jawabannya melalui penjaringan data, lalu dikembangkan berdasarkan penelitian menurut eksplanasi.¹⁷ Berdasarkan subfokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sembilan nilai antikorupsi diterapkan dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA ?
2. Bagaimana bentuk pengungkapan nilai antikorupsi di dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA ?

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 56.

3. Apa saja kah nilai antikorupsi yang sering muncul di dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan penelitian, secara umum tujuan dalam penelitian ini untuk mengungkap pengembangan nilai-nilai antikorupsi di dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA, adapun tujuan khususnya yaitu :

- a. Untuk mengetahui penerapan dari Sembilan nilai antikorupsi di dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengungkapan nilai antikorupsi di dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA.
- c. Untuk mengidentifikasi nilai anti korupsi yang sering muncul di dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik dan praktis antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat akademik, diantaranya ialah :
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kekayaan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan sebagai bentuk preventif dalam pencegahan kecenderungan melakukan korupsi dimasa yang akan datang.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lainnya yang ingin membahas secara komperhensif dan spesifik tentang nilai-nilai antikorupsi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA.
 - 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi para pendidik, khususnya pendidik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA untuk lebih massif lagi dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi ini kepada peserta didik.
- b. Manfaat Praktis, terdiri dari :
- 1) Manfaat bagi pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik, melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam.
 - 2) Manfaat bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan yang lebih kongkrit mengenai penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik, melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam tinjauan pustaka yang telah dilakukan, penulis memperoleh beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, diantara hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Gita Yuliani yang berjudul, “ *Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran PPKN Dalam Mengembangkan Karakter Jujur, Disiplin Dan Tanggung Jawab Siswa (Studi Kasus Di Sma Negeri 8 Bandung)*”, kesimpulan dari penelitian ini adalah penulis lebih berfokus untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi pada matapelajaran PPKN dalam menggambarkan beberapa karakter yang menjadi subjek penelitiannya, karakter tersebut ialah *Jujur, Disiplin Dan Tanggung Jawab Siswa*¹⁸.

Penelitian ini tentu berbeda karena pembahasannya yang lebih komperhensif mengenai temuan nilai – nilai antikorupsi yang terfdapat di dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Zeni Rocmatullah Ilyas yang berjudul “*Internaliasai Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Melalui Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti Peserta Didik kelas VII di SMP Negeri 5 Kota Yogyakarta*” kesimpulan penelitian ini adalah bagaimana seorang pendidik menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik kelas VII SMP Negeri 5 Yogyakarta.¹⁹

¹⁸ Gita Yuliani, “*Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran Ppkn Dalam Mengembangkan Karakter Jujur, Disiplin Dan Tanggung Jawab Siswa (Studi Kasus Di Sma Negeri 8 Bandung)*”, Tesis, Pendidikan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Kewarganagaran Sekolah Pasca Sarjana UPI, Bandung. 2016.

¹⁹ Mohammad Zeni Rocmatullah Ilyas yang berjudul “*Internaliasai Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Melalui Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti Peserta Didik kelas VII di SMP Negeri 5 Kota Yogyakarta*”, Skripsi, Jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) Fakultas Trabiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2016.

Sedangkan penelitian ini memiliki kajian yang lebih mengenai nilai – nilai antikorupsi dalam satuan pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA), yang terdapat di dalam buku teks pendidikan agama Islam dan Budi pekerti.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Imelda Frimayanti yang berjudul “*Pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Agama Islam*” kesimpulan dalam penelitian ini adalah penulis lebih berfokus pada bagaimana penerapan pendidikan antikorupsi ini dalam satuan pendidikan agama Islam²⁰

Sedangkan penelitian ini pembahasannya terfokus mengenai temuan nilai – nilai antikorupsi di dalam buku teks pendidikan agama Islam dan Budi pekerti dengan ruang lingkup yang lebih spesifik yaitu di satuan pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud yang berjudul ” *Integrasi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Nilai Antikorupsi Dengan Pembelajaran PKN dan IPS di Sekolah Dasar (Studi di SD Gedong kiwo Kota Yogyakarta)* ” kesimpulan penelitian ini adalah penulis berfokus pada Bagaimana penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi dengan pembelajaran PKN dan IPS di sekolah dasar²¹

²⁰ Ade Imelda Frimayanti “*Pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Agama Islam*”, Jurnal Pendidikan Islam, UNILA, Lampung, 2017.

²¹ Mahmud, *Integrasi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Nilai Antikorupsi Dengan Pembelajaran PKN dan IPS di Sekolah Dasar (Studi di SD Gedong kiwo Kota Yogyakarta)*, Tesis, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Konsentrasi Guru Kelas MI, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis disini memiliki pembahasan mengenai nilai – nilai antikorupsi yang terdapat di dalam buku teks pendidikan agama Islam dan Budi pekerti tingkat SMA.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nuriani Maula Naura Guring yang berjudul “*Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran di SMP keluarga Kudus*” kesimpulan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapakan pendidikan antikorupsi melalui adanya warung kejujuran yang ada di sekolah SMP keluarga Kudus.²²

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis disini memiliki perbedaan terkait nilai – nilai antikorupsi yang terdapat di dalam buku teks pendidikan agama Islam dan Budi pekerti tingkat SMA

F. Metode Penelitian

Untuk dapat memahami serta memudahkan pembahasan masalah yang telah dirumuskan dan untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu adanya metode penelitian yang cocok dan sesuai untuk menyimpulkan dan mengolah data yang dikumpulkan. Agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan data-data yang lengkap dan tepat, maka diperlukan metode-metode penelitian sebagai berikut :

²² Nuriani Maula Naura Guring, *Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran di SMP keluarga Kudus*, Tess, Program Studi Teknologi Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas sebelas maret, Surakarta, 2013.

1. Jenis penelitian

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan jenis dalam penelitian ini, dalam memperoleh datanya penelitian kajian kepustakaan akan memberdayakan sumber pustaka.²³ Sumber datanya bisa berupa karya grafis, buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, dan lain sebagainya.²⁴ yang di mana data tersebut berhubungan dengan penelitian ini.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah sebuah buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMA/MA/SMK/MAK, kelas X, XI, XII, terbitan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan tidak berbentuk angka, Penelitian kualitatif sering disebut juga dengan metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), dari hasil penelitiannya yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi²⁵

4. Sumber data

Jika di perhatikan dari sumber datanya, maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Data primer

²³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Buku Obor, 2004), h. 1.

²⁴ *Ibid.*, h. 6.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 14-15.

Data primer merupakan data yang di peroleh dan dikumpulkan sendiri oleh penulis dari sumber pertama atau dari tempat objek penelitian.²⁶ Data primer yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK, kelas X edisi revisi 2016, kelas XI edisi revisi 2017 , kelas XII edisi revisi 2018 terbitan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Pendidikan antikorupsi kajian antikorupsi teori dan praktik, karya dari Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan kontribusi dalam pengumpulan data. contohnya meluli dokumen atau karya orang lain. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa karya penulis lain yang pembahasannya selaras dengan penelitian ini baik dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, artikel, buku yang dapat melengkapi serta mendukung data-data primer.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik dokumentasi di pilih dalam penelitian ini untuk mengumpulkan datanya, teknik ini merupakan suatu upaya dalam mencari data dari peristiwa yang telah berlalu, dokumen bisa berupa karya-karya seseorang, tulisan, gambar yang berhubungan dengan yang berhubungan

²⁶ *Ibid.*, h. 16.

dengan nilai-nilai anti korupsi dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA.²⁷

6. Teknik analisis data.

Teknik analisis isi (*content analysis*) di gunakan penulis untuk menganalisis data yang telah terkumpul, definisi dari analisis isi ini terbagi menjadi beberapa pengertian menurut para ahli, sebagai berikut :

- a. *Ccontent analysis* merupakan suatu teknik penelitian untuk memahi persoalan atau latar belakang, teknik ini peruntukkan dalam membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi isi suatu pesan pada buku.²⁸
- b. *Content analysis* merupakan suatu upaya menganalisis pesan untuk mengobservasi serta menganalisis isi komunikasi yang terbuka dari komunikator yang terpilih dengan cara sistematis
- c. Analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks²⁹

Berdasarkan pendekatan yang digunakan maka penelitian ini menggunakan maka jenis *Content analysis* yang digunakan ialah analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*), jika di lihat dari metodologi kualitatif maka analisi isi berkedakatan dengan metode tafsir teks.³⁰ Metode ini diterapkan untuk menganalisis informasi yang terdokumentasikan dalam bentuk surat kabar, film, jurnal, buku, artiel dan lain sebagainya. Sebagai salah satu teknik dalam menganalisis data, *content analysis* mempunyai

²⁷ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 329.

²⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1989).

²⁹ *ibid*

³⁰ *Ibid.*, h. 3.

prosedur dalam memproses data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, menyajikan fakta, dan membuka wawasan baru.³¹ adapun prosedur analisis isi menurut fraenkel dan wallen sebagai berikut :³²

- a. Peneliti menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai.
- b. Mengidentifikasi istilah penting yang harus dijelaskan secara spesifik.
- c. Mengkhususkan unit yang akan diteliti.
- d. Mencari data yang berhubungan dengan penelitian
- e. Membangun rasionalitas untuk menjelaskan bagaimana data yang telah terkumpul berkaitan dengan tujuan.
- f. Merencanakan penarikan sample.
- g. Merumuskan pengkodean kategori

Setelah data teranalisis maka penulis disini menerapkan pola deduktif dalam penelitian ini, dimana pola ini terfokus untuk menarik pernyataan yang bersifat umum lalu di buat menjadi lebih khusus. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan gambaran mengenai hal yang diteliti dalam bentuk uraian naratif, yang berhubungan dengan nilai-nilai anti korupsi dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA.

³¹ Klause Krisependof, *Analisis Isi Pengantar dan Teori Metodologi*, (Jakarta : Rajawali Press, 1993), h. 15.

³² Satori, Djam'an Dan Komariah, *Metodologi Kualitatif*, (Banddung : Alfabeta, 2009), h. 56.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Tinjauan Umum Tentang Nilai – Nilai Anti Korupsi

Sebelum membahas tentang nilai – nilai anti korupsi, penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai data pendukung tentang nilai-nilai anti korupsi, sebagai berikut :

1. Konsep Umum Tentang Nilai

a. Teori Nilai

Nilai dalam bahasa Inggris “*value*”, dalam bahasa latin “*velere*”, atau bahasa Prancis kuno “*valoir*” yang memiliki arti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang”.³³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia nilai di maknai sebagai sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang dapat menyempurnakan manusia.³⁴ dapat diartikan bahwa nilai merupakan kualitas suatu hal yang menjadikannya di sukai, diinginkan, di kejar, di hargai, berguna dan suatu yang berharga bagi manusia

Adapun teori nilai menurut pendapat beberapa para ahli :

- 1) Luis D. Kattsof sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Maarif memberikan opininya. *Pertama*, nilai merupakan kualitas empiris yang

³³ Sutarjo Adikuslo, JR, *Pembelajaran Nilai Karakter*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h.56.

³⁴ Muhammad Andre Martin and F.V. Bhaskarra, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 963.

tidak dapat artikan dengan pasti, namun kita dapat mengalami dan memahami secara langsung kualitas yang terdapat dalam objek tersebut. Dengan demikian nilai tidak semata-mata subjektif, melainkan ada indikator yang terletak pada esensi objek itu. *Kedua*, nilai sebagai objek dari suatu kepentingan, yakni suatu objek yang berada dalam sebuah kenyataan maupun di dalam pikiran. *Ketiga*, nilai sebagai hasil dari pemberian nilai itu sendiri, jadi nilai itu diciptakan oleh situasi kehidupan nyata.³⁵

- 2) Menurut Chabib Thoha, mendefinisikan bahwa nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (Sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti . Jadi dapat diartikan bahwa nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku.³⁶

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai teori dari nilai, penulis dapat menyimpulkan bahwa nilai merupakan suatu sifat yang melekat erat pada jiwa manusia kehidupan manusia itu sendiri. Nilai dapat terwujud dalam diri seseorang dengan adanya indikator dari pola tingkah laku, sikap dan pola pikir. Sebagaimana diteketahui bahwa sikap merupakan manifestasi dari perkembangan nilai itu sendiri, Menurut Sax sikap

³⁵ Syamsul Ma'arif, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 114.

³⁶ Muhammad Chabib Thoha, *Islam, Kapita Selekta Pendidikan*, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 963.

merupakan “*a preference along a dimension of favourableness to unfavourableness to a particular group, institution, concept, or object.*”³⁷

Oleh karena itu penanaman suatu nilai dapat dilakukan melalui suatu sumber dan metode yang berbeda-beda, dan proses sosialisasi melalui keluarga, lingkungan, pendidikan, dan agama.

Jika hubungkan dengan pendidikan baik formal, informal, dan non formal, nilai yang diartikan di sini ialah nilai yang bermanfaat dalam peraktek kehidupan menurut sudut pandang ajaran agama Islam, sebagai sumber nilai tu sendiri.

b. Sumber Nilai

Muhaimin membagi sumber nilai menjadi dua macam, yaitu :³⁸

1) Nilai Ilahi

Nilai yang dititahkan Allah SWT melalui para Rasul-Nya berbentuk iman dan takwa, yang terabadikan dalam wahyu Illahi, seperti contoh ibadah sholat, zakat, puasa, haji. Nilai ini merupakan sumber utama bagi para pemeluk kepercayaannya. Dari ajaran *syari'at* agama, pengaktualisasian nilai kebajikan sangatlah penting. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-An'am/6: 115

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١١٥

³⁷ Sax, *Principles of educational and psychological measurement and evaluation*. (Washinton: Wadsworth publishing company, 1997), p. 493

³⁸ Muhaimin, Abdul Mudjib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 111-112.

Artinya: “Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yakni (Al-Qur’an) yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-An’am/6:115)³⁹

Nilai Illahi tidak akan mengalami perubahan, karena memiliki sifat kaku, mengandung kemutlakan bagi kehidupan manusia yang meyakinkannya. Ajaran agama yang dianutnya dapat tercermin dengan mengaplikasikan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari .

2) Nilai Insani

Nilai yang tumbuh atas kesepakatan manusia yang kemudian melembaga menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun serta mengikat anggota masyarakat yang meyakinkannya. seperti contoh bentuk kegiatan peringatan hari besar Negara, penggunaan bahasa di suatu daerah tertentu dan, lain sebagainya. nilai ini memiliki sifat dinamis (fleksibel) . Allah Swt berfirman di dalam Q.S. Al-Anfal/8:53

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥٣

Artinya: “(Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Anfal / 8 : 53)⁴⁰

Nilai insani ini yang kemudian membentuk menjadi organisasi kemasyarakatan dan menanamkan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasinya serta mengikat anggota

³⁹ Departement Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, ed. by ‘Abdul Azis ‘Abdur Rau’f, (Jakarta: Al-Huda Tim Gema Insani, 2002), h. 128.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 185.

masyarakat yang mendukungnya. Antara Nilai Illahi dengan nilai insani memiliki hubungan yang cukup kuat. Namun nilai Illahi memiliki fokus kedudukan nilainya bersifat vertikal yang lebih tinggi daripada nilai hidup lainnya. Di samping hirarkinya lebih tinggi, nilai Illahi mempunyai konsekuensi pada nilai lainnya, dan sebaliknya nilai lainnya itu memerlukan nilai pijakan yang berupa nilai Illahi .

c. **Macam-Macam nilai**

Nilai jika dilihat dari segi pengklasifikasian terbagi menjadi bermacam-macam, diantaranya: ⁴¹

1) Nilai Agama Islam, terdiri dari tiga bagian, yaitu: Nilai Keimanan (keyakinan), Nilai Ibadah (Syari'ah), dan Akhlak (sikap). pengelompokan ini didasari oleh penjelasan Nabi Muhammad SAW kepada Malaikat Jibril mengenai arti Iman, Islam, dan Ihsan yang esensinya sama dengan akidah, *syari'ah* dan akhlak.

2) Nilai terbagi menjadi dua jika dilihat dari segi sumbernya, yaitu : *Nilai Ilahiyyah*, adalah nilai yang bersumber dari Allah SWT dan *Nilai Insaniah* yang berasal dari peradaban manusia sendiri. Kedua nilai tersebut selanjutnya membentuk norma, kaidah kehidupan pada masyarakat pengikutnya.

⁴¹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 250.

d. Fungsi Nilai

Nilai mempunyai fungsi sebagai standar dan dasar dalam pembentukan konflik dan pencipta sebuah keputusan, motivasi dasar penyesuaian diri dan dasar perwujudan diri. Nilai sebagai sesuatu yang abstrak yang mempunyai sejumlah fungsi, antara lain:

- 1) Nilai memberi tujuan atau arah (*goals of purpose*) kemana kehidupan harus dituju, harus dikembangkan atau harus diarahkan agar lebih baik.
- 2) Nilai itu menarik (*interests*), memikat hati seseorang untuk dipikirkan, direnungkan, dimiliki, diperjuangkan, dan diahayati
- 3) Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku (*attitudes*), atau bersikap sesuai dengan moralitas masyarakat, jadi nilai itu memberi acuan atau pedoman hidup bagaiman seharusnya seseorang harus bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Nilai memberi aspirasi (*aspirations*) atau inspirasi kepada seseorang untuk hal yang berguna, baik, dan positif bagi kehidupannya.
- 5) Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan (*beliefs and convictions*) seseorang, terkait dengan nilai-nilai tertentu⁴².

Dengan mengetahui teori, sumber, macam – macam, dan fungsi dalam menanamkan suatu nilai, orang lain dapat memahami apakah nilai tersebut dapat ternanam dalam jiwa seseorang itu atau bahkan

⁴² Adisuslo, *Pembelajaran Nilai Karakter*.

dapat mengubah nilai yang kurang baik ke arah nilai yang baik.⁴³ Oleh karena itu fungsi nilai berperan penting dalam proses perubahan sosial, karena nilai berperan sebagai motivasi atau daya pendorong yang sangat kuat dalam hidup untuk mengubah diri sendiri atau masyarakat sekitarnya.

e. Pendekatan dan strategi penanaman nilai

Dalam menghadapi problematika generasi yang akan datang, Noeng Muhadjir berpendapat bahwa dalam strategi penanaman suatu nilai itu dapat dilakukan dengan cara menempatkan sikap yang diajarkan melalui pemahaman kognitif. Karena nilai yang baik, positif dan bermanfaat dapat dipahami melalui kemampuan kognitif seseorang. Oleh karenanya setiap pendidik terlebih guru pendidikan agama memiliki tugas dan kewajiban yang sama untuk menanamkan nilai-nilai *Ilahiyah* dan nilai *Insaniyah* terhadap peserta didiknya.⁴⁴

Masa depan pendidikan Islam haruslah pendidikan yang Islami, yakni pendidikan yang dijiwai oleh nilai-nilai akidah dan moral Al - Qur'an. Karena nilai moral (*moral values*) yang terkandung dalam Al - Qur'an dan Sunnah Rasul memiliki sifat yang unggul kompetitif secara universal terhadap nilai atau moral yang sekarang ini diterapkan secara universal. Untuk membentuk pribadi yang memiliki nilai atau moral yang baik maka diperlukan adanya suatu pendekatan penanaman nilai

⁴³ Muhammad Sastrapratedja, *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, ed. by 1 (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h. 25.

⁴⁴ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), h. 109.

(*inculcation approach*) yaitu suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai sosial dalam diri siswa.

Menurut Ansori Dalam menentukan pada nilai Islami, terdapat dua cara diantaranya sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Pendekatan dengan menggunakan kajian ilmiah tentang akhlak orang-orang muslim itu sendiri yang dapat dijadikan suritauladan.
- 2) Pendekatan melalui Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber utamanya. Validitas ini jelas, namun masih terbatas karena tidak semua nilai Islami dapat diketahui oleh banyak orang, maka perlu adanya penggalian lebih komperhensif dan spesifik kembali dari kedua sumber nilai Islami tersebut dengan pendukung-pendukung lainnya seperti yaitu Ijtihad, *Ijma'*, *Qiyas*, *Maslahah Mursalah*, *U'rys*, dan lain sebagainya.

2. Konsep Umum Tentang Korupsi

a. Definisi Korupsi

Secara etimologi korupsi berasal dari bahasa latin *corruptus/corrupti*. Dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa di Eropa, seperti *corruption* di Perancis, *corruptie* di Belanda, *corruption* dan *corrupt* dalam bahasa Inggris, kemudian bahasa tersebut di adopsi kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Perbuatan adil, benar, dan jujur merupakan kebalikan dari tindakan

⁴⁵ *Ibid*

korupsi.⁴⁶ Dalam KBBI korupsi memiliki makna perbuatan yang busuk seperti penerimaan sogok, penggelapan uang sebagainya.⁴⁷ Sedangkan koruptor ialah orang yang melakukan tindakan tersebut. Klitgaard berpendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Chatrina dan Dessy , korupsi merupakan suatu penyimpangan dari tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana melanggar aturan merupakan cara untuk memperoleh keuntungan atau uang serta status jabatan yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, atau kelompok).⁴⁸

Sedangkan, Mas'ood mengatakan bahwa korupsi adalah tindakan mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan melakukan transaksi atau imbalan di luar prosedur.⁴⁹ Perbuatan yang dikategorikan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta memanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini merupakan pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.⁵⁰ Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,

⁴⁶ Chatrina Darul Rosikah and Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori Dan Peraktik*, ed. by Tarmizi, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 1.

⁴⁷ Martin and Bhaskarra, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*, h. 327.

⁴⁸ Rosikah and Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, h. 2.

⁴⁹ Yudha Erlangga, *Panduan Pendidikan Anti Korupsi*, ed. by Nickyta Pramudia and Yuki Anggia Putri, 1st edn (Jakarta: Esensi, 2014), h. 6.

⁵⁰ Rosikah and Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, h. 1.

kolusi, serta nepotisme telah tertuang dalam UU No. 27 Tahun 1999 pasal 1 ayat 3, 4, 5 menyebutkan bahwa:⁵¹

- 1) Korupsi adalah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan aturan perundang-undangan.
- 2) Kolusi adalah kegiatan pemufakatan atau kerjasama secara masif antara penyelenggara negara dan pihak lainya dengan cara melawan hukum dan tindakan tersebut dapat merugikan orang lain, masyarakat, dan negara.
- 3) Nepotisme adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya, atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dari beberapa referensi yang ada, penulis menyimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, organisasi, institusi atau koorporasi yang tidak sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.

b. Faktor penyebab terjadinya korupsi

Korupsi adalah penyakit masyarakat yang harus segera di sembuhkan. jika tidak, penyakit ini akan semakin menyengsarakan banyak masyarakat. kemajuan, kemakmuran, dan perkembangan teknologi merupakan masalah utama dari perbuatan korupsi hal ini bisa terjadi karena semakin maju peradaban suatu negri maka akan

⁵¹ *Ibid.*, h. 3- 4.

semakin meningkat pula kebutuhan, dan dapat memicu seseorang untuk melakukan korupsi. Peristiwa korupsi terjadi dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya setidaknya terdapat dua faktor yaitu internal dan faktor. Kedua faktor tersebut secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵²

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri pribadi seseorang, faktor ini dapat dijabarkan dalam hal-hal berikut:

a) Sifat dan kepribadian yang rakus

perbuatan yang ingin memperoleh lebih banyak dari yang dilakukan, nama lain dari rakus ialah tamak. Para koruptor yang memiliki sifat rakus ini biasanya dilatarbelakangi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari oranglain..

b) Iman yang lemah.

Orang yang rentan imannya dapat dengan mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang berbau kriminalitas, termasuk perbuatan korupsi. Landasan agama ialah tiang utama dalam membentengi perilaku seseorang. Apabila iman seseorang kuat, niscaya mereka akan terhindar dari prakti-praktik korupsi, namun sebaliknya jika iman seseorang lemah niscaya maka seseorang tersebut dekat akan perbuatan-perbuatan kejahatan seperti korupsi.

⁵² Rosikah and Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, h. 6.

c) Penghasilan yang kurang mencukupi.

Menurut *Rose-Ackerman, low salaries and poor monitoring at the public sector are not only incentives for corruption but also instigate corruption perception even when a corrupt action does not occur*⁵³, Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bila penghasilan dari bekerja kurang mencukupi kebutuhan hidup, seseorang tersebut bisa saja melakukan tindakan korupsi, biasanya kasus ini terjadi bagi kalangan masyarakat tingkat menengah

d) Kurangnya akhlak dan moral.

Seseorang yang melakukan korupsi telah menyimpang dari ajaran moral. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik, bahkan dianggap tercela. Oleh sebab itu orang yang melakukan korupsi dapat dikatakan sebagai orang yang tidak berakhlak atau tidak bermoral.

e) Kebutuhan hidup.

Korupsi dapat terjadi disebabkan karena tekanan ekonomi. Tidak dipungkiri bahwa faktor ekonomi ini lah yang menjadi sorotan utama dalam motif seseorang melakukan korupsi. Dengan penghasilan yang kurang memadai dari kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi.

⁵³ Natalia Melgar, Máximo Rossi and Tom W. Smith, The Perception Of Corruption, *International Journal of Public Opinion Research* Vol.22No.1(16 April, 2020), h.121.

f) Tidak mau sengsara dalam bekerja.

Orang yang melakukan tindakan korupsi tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan uang yang lebih, salah satu caranya yaitu dengan menipu, menggelapkan uang orang lain, mengambil hak orang lain, yang semua itu merupakan peialku dari korupsi.

g) Mengikuti gaya hidup.

Gaya hidup adalah prilaku yang dilakukan untuk membentuk citra diri seseorang dalam status sosial. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi biasanya enggan untuk bersosialisasi dengan kalangan yang ada dibawahnya. Hal ini harus membeuat seseorang tersebut untuk merogoh kantongnya untuk berbelanja guna menutupi gaya hidup seseorang tersebut yang terlalu mewah.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri, yang dapat mempengaruhi sikap dan kebijakan kita, biasanya faktor ini dipengaruhi oleh lingkungan, teman, keluarga, dan institusi tertentu. Berikut ini ada beberapa faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi, sebagai berikut :⁵⁴

a) Faktor organisasi.

Dalam hal ini organisasi yang dimaksud ialah lingkungan sekitar diri seseorang tersebut, organisasi yang menjadi saran

⁵⁴ Rosikah dan Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik* h. 8.

terbentuknya perilaku korupsi biasanya disebabkan karena adanya peluang yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya kurang adanya keteladanan dari seseorang pemimpin, kultur organisasi yang salah, sistem akuntabilitas yang kurang memadai, serta kurangnya manajemen yang terarah dan sistematis.⁵⁵

b) Faktor ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab tindakan korupsi, hal ini dapat dilihat dari gaji atau pendapatan yang tidak mencukupi dalam keperluan kebutuhan hidup seseorang atau keluarga. Menurut Baharuddi Lopa sebagaimana yang dikutip Muhammad Nurul Irfani awalnya korupsi itu terjadi karena kondisi ekonomi seseorang yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman motif klasik ini bergeser menjadi motif ingin memperoleh kemewahan hidup, jika terjadi hal ini akan mendorong seseorang yang tidak kuat imannya akan melakukan tindakan korupsi guna memenuhi hasrat untuk memperkaya diri sendiri.⁵⁶

c) Faktor perilaku masyarakat.

Pembiaran atau acuh tak acuh dari masyarakat terkait praktik-praktik korupsi menjadi jalan mulus bagi para koruptor, padahal terkadang masyarakat mengetahui bahwa disekitar lingkungannya

⁵⁵ Rosikah dan Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik* h. h, 9.

⁵⁶ Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, ed. by Achmad Zirzis, 1st edn (Jakarta: Amzah), 2012, h. 36.

terjadi adanya tindakan korupsi, masyarakat tersebut cenderung untuk menutupinya karena kepentingan segelintir oknum.⁵⁷

d) Faktor politik.

Faktor politik merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari kepentingan dari para pemegang kekuasaan. Kasus suap serta politik uang juga sering terdengar dimasyarakat. Persaingan dalam sebuah kompetisi politik merupakan salah satu penyebab korupsi, terutama di kalangan para elit politik.⁵⁸

e) Faktor hukum.

Faktor hukum dalam tindakan korupsi dapat dilihat dari dua hal, yaitu perundang-undangan dan lemahnya penegak hukum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, masih banyak tindakan dan aturan yang bersifat diskriminatif, berpihak, tidak adil, dan timpang tindih.⁵⁹ Faktor ini terjadi dikarenakan penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, langkanya lingkungan yang antikorup, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara, kemiskinan dan keserakahan, budaya memberi upeti atau imbalan atau hadiah.⁶⁰

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 37.

Adapun faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:⁶¹

- 1) Lemahnya pendidikan agama dan etika
- 2) Kolonoialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- 3) Tidak adanya sanksi keras.
- 4) Kurangnya lingkungan antikorupsi.
- 5) Struktur pemerintahan.
- 6) Perubahan radikal, sehingga korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- 7) Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi dapat mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Dari beberapa pendapat para pakar diatas mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi ialah sifat egoisme manusia yaitu perpaduan anatara niat dan kesempatan sehingga dapat merubah sebuah sistem hanya untuk kepentingan pribadi.

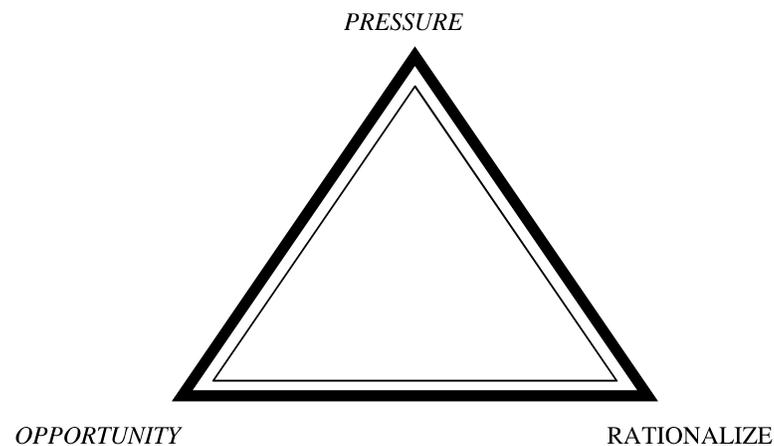
kecurangan atau penipuan erat kaitannya dengan perbuatan korupsi, dasar dari kecurangan atau penipuan ialah kebohongan. Kejujuran negeri ini dinilai sudah sangat langka. Ada 4 (empat) katagori kejujuran. Pertama, beberapa orang jujur untuk setiap saat. Kedua, sejumlah orang tidak jujur untuk setiap saat. Ketiga, sebagian besar orang jujur untuk setiap saat. Keempat, sejumlah orang jujur

⁶¹ Rasyidi, *Pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Islam*, *Jurnal Tamaddun Ummah*, 1.1 (2015), h. 37.

hampir setiap saat. Dari empat tipe perilaku yang berkaitan dengan kejujuran tersebut, perilaku keempat yang paling baik dan relevan untuk menumbuhkan perilaku antikorupsi.⁶²

Albrecht dan Chad O. Albrecht, sebagaimana yang dikutip oleh Rasyid, menyebut tiga penyangga kecurangan yang mampu mendorong seseorang bertindak korupsi sebagai segitiga kecurangan. Dalam sebuah gambar sebagi berikut,

Gambar 2. Segitiga Kecurangan



Dalam kaitan dengan korupsi, perbuatan korupsi dalam ditimbulkan dari kecurangan. Adanya 3 (tiga) tiang penyangga korupsi, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalize*) yang membuat seseorang nekat melakukan perbuatan melanggar hukum ini. Tekanan hidup seperti modernitas,

⁶² Eko Handoyo, *Pendidikan Antokorupsi*, (Semarang : OMBAK, 2013), h. 25.

terlilit hutang, gaya hidup yang glamor cakan menyebabkan seseorang berbuat curang atau korupsi.⁶³

c. Jenis-Jenis Korupsi

Memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau prekonomian negara merupakan rumusan tindakan pidana korupsi sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 2 Ayat 1.⁶⁴ korupsi dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis sesuai dengan undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang berhubungan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 diantaranya terkait kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.⁶⁵

Klasifikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di masyarakat dibagi menjadi tiga, Menurut Poerba sebagaimana yang dikutip oleh chatrina dan Dessy, yaitu sebagai berikut.⁶⁶

1. Kelas bawah yaitu KKN yang dilakukan secara kecil-kecilan, namun dapat berdampak luas karena menyangkut ujung tombak dalam pelaksanaannya korupsi dibidang birokrasi, biasanya KKN yang dilakukan oleh para oknum ini disebabkan hanya untuk

⁶³ *Ibid*, h. 26.

⁶⁴ Rasyidi, *Pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Islam, Jurnal Tamaddun Ummah*, h 37

⁶⁵ Rosikah and Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, h. 17.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 14.

bertahan hidup dikarnakan oleh minimnya gaji yang diperoleh oleh oknum yang melakukan KKN tersebut.

2. Kelas menengah, KKN pada tingkatan ini tidak hanya digunakan untuk sekedar bertahan hidup, tetapi terindikasi dilakukan untuk mempertahankan jabatan atau posisi, dan menambah kekayaan dengan cara yang tidak profesional. Biasanya oknum yang melakukan korupsi ini ialah pegawai negeri dan birokrasi dengan menggunakan kekuasaan serta wewenangnya.
3. Kelas atas merupakan KKN yang dilakukan oleh para penentu kebijakan, dalam kecurangannya biasanya bekerja sama dengan para pelaku bisnis multinasional atau para konglomerat.

d. Komponen Nilai-Nilai Antikorupsi

Tindakan menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh suatu keuntungan atau manfaat secara pribadi atau manfaat untuk kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan kalayak umum, merupakan penyakit bagi masyarakat oleh karenanya nilai antikorupsi memiliki sifat yang berguna dan sangat di butuhkan oleh masyarakat, karena dengan adanya nilai ini maka akan menghasilkan tingkah laku yang baik terlabih untuk diri sendiri mapun untuk orang lain.⁶⁷

⁶⁷ Louis O. Kaffsoff, *Elements of Philosophy/Pengantar Filsafat*, Terj. Soenarjo Soemargono, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1996), h. 345.

Korupsi dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan atau mengurangi kedua faktor tersebut. Apabila nilai antikorupsi tertanam dengan kuat di dalam diri setiap individu, maka kecenderungan faktor internal terjadinya korupsi dapat dicegah.⁶⁸ Adapun upaya dalam pencegahan terjadinya korupsi dari faktor internal ialah dengan cara menanamkan nilai antikorupsi pada setiap individu melalui sektor pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan informal maupun non formal. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ada beberapa nilai-nilai anti korupsi yang dapat diinternalisasikan dalam dunia pendidikan sebagai upaya preventif dalam pencegahan kecenderungan korupsi bagi para peserta didik, nilai-nilai anti korupsi tersebut ialah:⁶⁹

Tabel 1

Nilai-Nilai Anti Korupsi Menurut Kemendikbud

No	Nilai	Deskripsi
1	Kejujuran	Kejujuran adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
2	Kepedulian	Kepedulian adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan

⁶⁸ Rosikah and Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, h. 67.

⁶⁹ Hermawan, *Relevansi Ayat-Ayat Qur'ani Dengan Muatan Materi Pendidikan Kewarganegaraan SMP Dalam Pendidikan Anti Korupsi*, *Jurnal Pendidikan Islam*, 8.2 (2015), h. 26.

		kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
3	Kemandirian	Kemandirian adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugasnya.
4	Kedisiplinan	Kedisiplinan adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5	Tanggungjawab	Tanggung Jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
6	Kerja keras	Kerja Keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
7	Kesederhanaan	Kesederhanaan adalah bersahaja dan sikap serta perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati
8	Keberanian	Keberanian adalah mempunyai hati yang mantap dan percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya. (tidak takut, gentar) dan pantang mundur.
9	Keadilan	Keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak/tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif, dan proporsional.

B. Tinjauan Umum Pendidikan Agama Islam

1. Definisi Pendidikan Islam

Jika dilihat dari padanan suku katanya, kata pendidikan Islam terdiri dari dua kata, yaitu “pendidikan” dan “Islam”. Pendidikan itu sendiri dalam arti bahasa Inggris memiliki makna *education*. Menurut John Dewey bahwa *education is a process of overcoming natural inclination and substituting in its place habits acquired under external pressure*.⁷⁰

Sedangkan konteks pendidikan dalam sudut pandang Islam, jika dilihat dari bahasanya, terdapat tiga kata yang lazim digunakan untuk mewakili dari pengertian pendidikan Islam itu sendiri. Ketiga kata tersebut, yaitu (1) “*at-atarbiyah*”, (2) “*alta’lim*”, dan (3) “*al-ta’dib*”. Term *at-atarbiyah* berakar dari dua kata, yakni *pertama*, berasal dari kata *rabba yarbu* yang artinya bertambah tumbuh. *Kedua*, berasal dari kata *rabba yarubbu* yang artinya memperbaiki, membimbing, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara.⁷¹

Menurut Abu A’la al-Mardudi “kata *rabbun* memiliki makna kekuasaan, perlengkapan, pertanggungjawaban, perbaikan, penyempurnaan, dan lain-lain. Kata ini juga merupakan predikat bagi suatu kebesaran, keagungan, kekuasaan, dan kepemimpinan.” Suatu proses pentransferan pengetahuan antar manusia merupakan definisi dari *ta’lim* menurut Abd. al-Rahman⁷².

⁷⁰ John Dewey, *Experience and Education*, (New York: Touchstone Rockefeller Center, 1997), h. 17.

⁷¹ Al-Raghib Al-Isfahany, *Mu’jam Al-Mufradat Al-Fazh Al-Qaur’an* (Beirut: Dar al-Fikr), h. 189.

⁷² Abd al-rahman Abdullah, *Usus Al-Tarbiyah Al-Islamiyah Wa Thuruq Tadrissuha* (Damaskus: Dar Al-Nahdhah al-Arabiyah, 1965), h. 27.

Pemfokusan aspek kognitif dan psikomotorik kepada peserta didik dinilai kurang cukup hal tersebut perlu adanya penambahan aspek afektif sebagai perwujudan dari ilmu yang mereka peroleh. Suatu proses pembimbingan kearah pengenalan dan pengakuan kekuasaan serta keagungan Allah SWT didalam suatu penciptaan-Nya merupakan rangkaian pengertian Ta'dib menurut Al-Atas.⁷³

Kata “*tarbiyah*” paling populer dipakai orang ada masa sekarang yang untuk mendefinisikan pendidikan, karena *tabiyah* meliputi keseluruhan kegiatan pendidikan yang berarti suatu upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna dalam segi kognitif, afektif, psikomotorik, sistematis dalam berfikir, memiliki ketajaman intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki toleransi pada yang lain berkompetensi dalam hal yang baik, berkomunikasi dengan bahasa lisan dan tulisan yang baik dan benar serta memiliki beberapa keterampilan.⁷⁴

Pengertian Pendidikan Islam dirumuskan oleh para pakar pendidikan Islam sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Ada beberapa ahli pendidikan yang mendefinisikan mengenai pendidikan Islam diantara rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Omar Mohammad al-thoumi Al-Syaibani, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Nzaquib Al-Attas,⁷⁵ menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan

⁷³ Muhammad Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1998).

⁷⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, h 35-36.

⁷⁵ Omar Mohammad al-Toumi Al-Syaibaniy, *Falsafah Al-Tarbiyah Al-Islamiyah (Terj) Hasan Langgulung* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h.339.

pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya agar terciptanya kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

- b. Ahmad D. Marimba sebagaimana yang dikutip oleh Rasyidi, memberikan opini bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu proses untuk membimbing jasmani dan rohani peserta didik berdasarkan *syari'at* Islam agar terbentuknya kepribadian utama menurut tolak ukur Islam.⁷⁶
- c. Rumusan Konferensi Pendidikan Islam sedunia yang ke-2, pada tahun 1980, menghasilkan definisi tentang pendidikan Islam yang bermakna bahwa pendidikan Islam harus ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan personalitas peserta didik secara komperhensip, dengan cara melatih jiwa, akal, perasaan, dan fisik manusia sesuai dnegan syari'at Islam.⁷⁷

Dari beberapa pendapat para ahli diatas yang membahas tentang definisi pendidikan Islam, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk melakukan proses penyampaian suatu ilmu pengetahuan dari seorang pendidik kepada pesesta didik, membimbing peserta didik, serta mengarahkan peserta didik kejalan yang sesuai dengan syari'at ajaran Islam, agar mereka menjdi pribadi yang memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan kesehariannya.

⁷⁶ Rasyidi, 'Pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Islam', *Jurnal Tamaddun Ummah*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2015), h. 3.

⁷⁷ Second World Conference on Muslim Education, *International Seminar on Islamic Concepts and Curriculum* (Islambad: Recommendation, 1980), h. 6.

2. Landasan Pendidikan Agama Islam

Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber pokok hukum Islam di seluruh dunia. Kedua sumber primer tersebut berlaku sepanjang zaman. Itu artinya al-Quran dan Sunnah berlaku sejak Nabi Muhammad saw diangkat sebagai Rasul sampai kehidupan di dunia ini berakhir. Heterogenitas umat Islam dengan mazhab yang beragam mengakui dan menggunakan al-Quran serta al-Hadis sebagai dua sumber pokok. Sudah barang tentu tingkat pemahaman, intepretasi, penghayatan dan pelaksanaan norma- norma al-Quran dan Sunah tersebut tidak dapat disamakan begitu saja antara satu wilayah dan lainnya. Problem sosial-kultural setempat ikut berperan memberi corak pemahaman yang berberda satu dan yang lainnya.⁷⁸

Pendapat tersebut selaras dengan pendapat yang dilontarkan oleh Miqdad Yaljan yang menyebutkan bahwa landasan atau pondasi dalam pendidikan Islam adalah terdiri dari Al- Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw yang dapat dikembangkan dengan *ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, *'urf*, *istihsan*, dan lain lain.⁷⁹ Al- Qur'an dan Haidts merupakan dua sumber pokok dalam melakukan *ijma'* pada semua amal perbuatan yang sesuai dengan syari'at islam, dari banyak ayat yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an yang menerangkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam, yang telah di pastikan tida ada keraguan lagi padanya, di dalam Q.S. Al-Baqarah/2:2 Allah SWT berfirman, ,

⁷⁸ Miftahur Rohman, Hairudin, *Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-Nilai Sosial Kultural*, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 9, No. I 2018, h. 25- 26.

⁷⁹ Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN-Malang pers, 2008), h. 30.

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۚ

Artinya : “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa..” (Q.S. Al-Baqarah/2:2)⁸⁰

Di dalam ayat tersebut , Muhammad Quraish Shibab memberikan penafsirannya Inilah kitab yang sempurna, yaitu al-Qur’ân yang telah Kami turunkan. Orang-orang yang berakal sehat tidak akan dihindangi rasa ragu bahwa al-Qur’ân diturunkan oleh Allah Swt. dan membenarkan apa-apa yang tercakup di dalamnya berupa hukum, kebenaran dan petunjuk yang berguna bagi orang-orang yang siap mencari kebenaran.⁸¹

3. Tujuan Pendidikan Agama islam

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai suatu disiplin ilmu, yang memiliki karakteristik dan tujuan yang memiliki perbedaan dari disiplin ilmu lainnya. Pendidikan agama Islam di Indonesia memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, peserta didik melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya kepada Allah swt. serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini merupakan pendapat dari Pusat kurikulum Depdiknas⁸²

Menurut Toto Suharto, pendidikan Islam memiliki dua tujuan, yaitu tujuan primer dan tujuan sekunder.

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, h. 3.

⁸¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah “pesan, Kesan, Dan Kesserasian Al-Qur’an*, 1st edn (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 3.

⁸² Kholidah, Ahmad Munjin Nasih, and Nur Lilik, *Metode Dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 7.

- a. Tujuan primer pendidikan Islam adalah penghambaan dan penyerahan diri secara total kepada Allah SWT..
- b. Sedangkan tujuan sekunder pendidikan Islam biasanya dijabarkan dalam bentuk kurikulum atau program pendidikan.⁸³

in Islamic education the general aim is to build up the individual who will act as Allah's khalifah or at least to put him on the path that leads to such an end. The main concern of Allah's khalifah is to believe in Allah and subject himself completely to him, merupakan tujuan pendidikan Islam secara umum menurut sudut pandang Abdul Rahman Salih Abdullah.⁸⁴ Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Artinya : “ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan s upaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”
(Q.S. Adh Dzariyat/51:56).⁸⁵

Dalam ayat ini di jelaskan bahwa manusia dan jin diciptakan untuk diperintahkan dan dibebankan beribadah kepada Allah swt. Bukan karena Dia memerlukan kepada mereka dalam memperoleh suatu rezki maupun mendatangkan makanan. Karena Allah itulah yang memberi rezki lagi mempunyai kekuatan.⁸⁶

C. Teori Buku Teks Pelajaran

Menurut Nasution sebagaimana yang dikutip oleh Anisah dan Azizah menjelaskan bahwa buku pelajaran biasanya merupakan sebuah hasil

⁸³ Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 113.

⁸⁴ Abdul Rahman Salih Abdullah, *Educational Theory A Qur'anic Outlook*, (Makkah: Umm Al-Qura University, t.th), h 116.

⁸⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h. 524.

⁸⁶ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 27* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 21.

seorang pengarang atau tim pengarang yang disusun berdasarkan kurikulum atau penafsiran tentang kurikulum yang berlaku. Biasanya buku pelajaran merupakan salah satu pendekatan tentang implementasi kurikulum dan karena itu ada kemungkinan terdapat berbagai macam buku pelajaran tentang satu bidang studi tertentu buku teks pelajaran adalah sebuah karya tulis yang berbentuk buku dalam pelajaran tertentu yang merupakan buku standar yang dipergunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar yang dilengkapi dengan sarana prasarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh peserta didik sehingga dapat menunjang program pengajaran.⁸⁷ Menurut James Andrew Laspina sebagaimana yang dikutip oleh Muhmmad Akmansyah mendefinisikan buku teks sebagai berikut : *a textbook is a book which is an exposition of generally accepted principles in onesubject, intended, primarily as a basis for instruction in classroom or pupil book teacher situation.*⁸⁸

Buku teks atau buku pelajaran merupakan buku yang digunakan siswa dalam mendukung kegiatan belajar yang berisi uraian mengenai materi tertentu yang disusun secara sistematis dengan tujuan tertentu buku teks pelajaran ini digunakan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah

⁸⁷ Anisah dan Azizah, *Pengaruh Penggunaan Buku Teks Pelajaran Dan Internet Sebagai Sumber Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPS*, Jurnal Logika vol. XVIII. No. 3 desember 2016 h. 5

⁸⁸ Muhammad Akamansyah, *Analisis Nilai-Nilai Kompetensi Sikap Spiritual Dan Social Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam di SMA*, (Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Lampung), h. 15

biasanya selain memuat materi juga memuat soal-soal yang dapat dikerjakan siswa untuk melatih kegiatan belajar siswa.⁸⁹

Buku teks pelajaran yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini ialah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama, disebarluarkan ke semua sekolah di tanah air sebagai buku pegangan wajib serta tidak diperdagangkan.⁹⁰ Selain itu, dalam Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan bahwa "Buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan".⁹¹ Tarigan memberikan opininya mengenai buku teks pelajaran sebagai berikut :

1. Buku ajar merupakan buku pelajaran yang ditujukan bagi siswa pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SMA/SMK, dan sebagainya)
2. Buku ajar selalu berkaitan dengan bidang studi tertentu misalnya (Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Fisika, Sejarah, dan sebagainya).

⁸⁹ Gustini Rahmawati, *Buku Teks Pelajaran Sebagai Sumber Belajar Siswa Di Perpustakaan Sekolah SMAN 03 Bandung*, Education, 5.1 (2015), h. 104.

⁹⁰ Tarigan, *Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia*, (Bandung : Angkasa, 1986), h. 15.

⁹¹ Lihat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 (3) tentang Buku.

3. Buku ajar merupakan buku standar dalam proses pembelajaran. Definisi standar di sini ialah baku, menjadi acuan berkualitas dan biasanya ada tanda pengesahan dari badan wewenang di bawah Dinas Pendidikan Nasional.
4. Buku ajar dilengkapi dengan sarana pengajaran.
5. Buku ajar ditulis untuk tujuan intruksional tertentu.
6. Buku ajar ditulis oleh pakar di bidangnya masing-masing.⁹²

Dari pengertian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa buku teks pelajaran memiliki arti buku yang diterbitkan dan disebarluaskan oleh pemerintah sebagai buku pelajara dalam bidang studi tertentu yang meruoakan buku standar dan disusun oleh para pakar dalam bidang dipergunakan untuk menunjang pembelajaran yang ada di sekolah. Buku teks biasanya tergolong menjadi dua yaitu buku teks pengarang guru dan yang kedua ada adalah buku teks pegangan siswa yang berisi materi materi pembelajaran yang berkesinambungan dengan kurikulum yang mencapai tujuan yang telah ditentukan .

1. Fungsi Buku Teks Pelajaran

Buku teks pelajaran mengandung bahan belajar yang dapat memberikan kemampuan kepada peserta didik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam sebuah kurikulum Oleh karena itu keberadaan dari buku teks pelajaran tersendiri sebagai sumber belajar tidak dapat dipisahkan dari kurikulum adapun fungsi buku teks pelajaran ditinjau dari sisi penyajiannya berfungsi sebagai pedoman

⁹² Tarigan, *Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia*, h. 11

nominal bagi siswa dalam belajar fungsi buku teks sebagai pedoman belajar bagi siswa berarti siswa menggunakannya sebagai acuan utama, sebagai berikut :

- a. Berinteraksi dalam proses pembelajaran di kelas.
- b. Mempersiapkan diri secara individu atau kelompok sebelum kegiatan belajar di kelas.
- c. Mempersiapkan diri untuk menghadapi tes atau ujian formatif maupun sumatif.
- d. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik .

Selain bagi peserta didik buku teks pelajaran juga memiliki fungsi membuat desain pembelajaran mempersiapkan sumber belajar yang lain mengembangkan bahan pelajaran membentuk tugas dan menyusun bahan evaluasi yang sangat membantu pendidik. Buku teks pelajaran harus memiliki kualitas yang baik karena memiliki fungsi sangat penting bagi keberlangsungan pembelajaran yang bermutu. ⁹³

2. Kriteria Buku Teks Yang Berkualitas

Menurut Pudji Muljono buku teks yang berkualitas harus memperhatikan hal-hal berikut : ⁹⁴

- a. Psikologi perkembangan peserta didik

Tingkat perkembangan psikososial seseorang akan mempengaruhi proses penerimaan dan pengolahan informasi secara optimal artinya

⁹³ Sitepu, *Penulisan Buku Teks Pelajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012), h. 21.

⁹⁴ Pudji Muloyono, *Kegiatan Penilaian Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar Dan Menengah, Publikasi Artikel*, 2.1 (2007).

penyajian yang baik belum menjamin materi yang disajikan dapat mengoptimalkan proses belajar, oleh karena itu diperlukan kematangan kognitif dan sosial emosional pembaca yang akan menjadi sasaran buku pembelajaran misalnya tingkat kesulitan konsep yang di bahas, kemampuan kebahasaan, menghargai keragaman dan kesesuaian konteks.

b. Proses belajar aktif

Melalui perolehan umpan balik khususnya yang positif akan menimbulkan rasa puas yang berfungsi sebagai *reward* bagi peserta didik yang pada akhirnya akan membangkitkan motivasi dari dalam diri sendiri, hal ini bisa terjadi jika peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran secara terus-menerus, melalui keterlibatan tersebut dapat terjalin komunikasi interaktif yang diperlukan bagi terpeliharanya suasana belajar dan diperolehnya umpan balik yang diperlukan untuk memacu pembelajaran yang berkelanjutan. Dengan demikian penyajian sebuah buku hendaknya memuat contoh konkrit dalam kehidupan sehari-hari yang merangsang peserta didik untuk mencoba atau mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya dalam kehidupan nyata.

c. Strategi Pengolahan Informasi

Sebuah buku yang baik harus mampu membangkitkan minat dan perhatian peserta didik untuk membaca teks bacaan hal ini diperlukan agar informasi mampu diserap sebagai rangsangan namun segala sesuatu yang diserap ini baru bisa berarti dan di ingat bila informasi di

olah dalam ingatan jangka panjang, misalnya informasi yang disimpan dengan organisasi yang baik akan membentuk jaringan pengetahuan yang saling terjalin tidak sekedar merupakan ingatan asosiatif belaka, dikategorisasikan dan diberi makna serta dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Berarti semua buku harus tampil dalam wajah yang menarik minat dan memikat, selain itu isi bahasanya harus dapat mengoptimalkan tingkat olah pikir peserta didik misalnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemecahan masalah pemberian contoh-contoh kongkrit eksperimen dan penelusuran proses dari pengalamannya.

D. Teori Bentuk Pengungkapan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata pengungkapan berasal dari “ungkap” yang memiliki arti membuka atau melingkap, sedangkan mengungkapkan memiliki arti melahirkan perasaan hati (dengan perkataan, air mata, gerak-gerik), menunjukkan, membuktika, menyingkapkan (tt sesuatu yg tadinya masih menjadi rahasia atau tidak banyak diketahui orang), mengemukakan; menyatakan; memaparkan, menerangkan dengan jelas, atau menguraikan. Sedangkan arti pengungkapan merupakan suatu proses atau cara atau perbuatan dalam mengungkapkan sesuatu.⁹⁵

⁹⁵Typoonline, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*”, Tersedia di: <https://typoonline.com/kbbi/pengungkapan>, . pada tanggal 03 Juni 2020

E. Teori Intensitas

Kata secara etimologi intensitas berasal dari kata “intens” yang berarti semangat, sangat kuat, hebat, bergelora, berapi-api, berkobar-kobar (tentang perasaan), sangat emosional (tentang orang) yang dimiliki seseorang dan diwujudkan dalam bentuk sikap maupun perbuatan.⁹⁶ Intensitas juga bisa diartikan sebagai kekuatan, kemampuan, gigih, kehebatan.⁹⁷ Sedangkan dalam sudut pandang kamus psychology intensitas memiliki arti kuatnya perbuatan, pengalaman, atau kekuatan dalam mempertahankan sikap.⁹⁸ Konteks intensitas jika diartikan secara terminology memiliki makna efektifitas dari sebuah tindakan atau proses yang dilakukan secara rutin. Jadi, intensitas ini merupakan kegiatan yang dilakukan lebih dari satu kali atau berulang-ulang apabila dilakukan semakin lama semakin meningkat frekuensinya. Jika intensitas dilihat dari segi sifatnya maka dapat dimaknai dengan terus-menerus serta sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu sehingga memperoleh hasil yang maksimal.⁹⁹ Intensitas sendiri memiliki beberapa indikator yaitu sebagai berikut:¹⁰⁰

⁹⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), h. 186-187.

⁹⁷ Partanto, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arloka, tanpa tahun), h. 265.

⁹⁸ Ashari M. Hafi, *Kamus Psychology*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), h. 297.

⁹⁹ Ahmad Watik dan Abdussalam M. Safro, *Etika Islam dan Kesehatan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), h. 45.

¹⁰⁰ Eilaneranti Arsyana, *Pengaruh Intensitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah Kabupaten*, *Jurnal Ilmu Politik Dan pemerintahan Lokal*, Volume II Edisi 1, Januari-Juni 2013, h. 74-75.

a. Motivasi

Pengertian dasar motivasi adalah kegiatan internal organisme (baik manusia maupun hewan) yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Motivasi merupakan pemasok kekuatan untuk melakukan perbuatan secara terarah.

b. Durasi kegiatan

Merupakan berapa lamanya kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan. Dapat dipahami bahwa motivasi akan terlihat dari kemampuan seseorang melaksanakan kegiatan dengan durasi waktu seberapa lama.

c. Frekuensi kegiatan

Frekuensi yang dimaksud ialah seringnya suatu hal itu dilaksanakan dalam periode waktu tertentu. Misalnya dengan seringnya suatu konteks kata yang terulang dalam satu buku.

d. Presentasi

Presentasi yang dimaksud dalam hal ini ialah harapan, keinginan, atau gairah yang keras untuk merencanakan tujuan, cita-cita, dan target yang hendak dicapai dalam suatu kegiatan.

e. Arah sikap

Arah sikap merupakan suatu kesiapan pada diri seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal yang bersifat positif dengan adanya kecenderungan tindakan mendekati, menyenangkan, serta mengharapkan objek tertentu dan hal yang bersifat negative yang dapat di